

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2015 TENTANG LARANGAN PENYALAHGUNAAN FUNGSI
LEM DI KOTA PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

ABSTRAK

Robby Firly, 1210843021, Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kota Payakumbuh, Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing Oleh : Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA dan Roza Liesmana, S.IP, Msi. Skripsi ini terdiri dari 154 Halaman dengan referensi 6 buah buku teori, 4 buku metode, 3 skripsi, 1 Peraturan Daerah, dan 9 website internet.

Dalam rangka menyelamatkan generasi muda dan menjaga keamanan dan kenyamanan di masyarakat, Pemko Payakumbuh mengeluarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kota Payakumbuh. Sehingga banyak Masyarakat yang sadar akan bahayanya dari penyalahgunaan lem ini pada manusia atau orang. Satpol PP sebagai penegak perda tentu akan melakukan tindakan yang akan menegakkan aturan seperti razia, maka masalah yang ada pada masyarakat atau korban dari penyalahgunaan fungsi lem tersebut berkurang. Kemudian Dinas Sosial akan melakukan proses rehabilitasi pada korban penyalahgunaan fungsi lem melalui lembaga rehabilitasi seperti LSM GEMPA Payakumbuh. Selain itu Dinas Kesehatan juga melakukan rehabilitasi secara medis kepada orang/anak lem yang datang berkunjung untuk berobat atau dari rekomendasi Satpol PP atau Instansi lainnya. Fenomena dari banyaknya ada nya perda ini ini menghasilkan perubahan bahwa makin berkurangnya anak lem yang ditemui oleh implementor dilapangan, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji kinerja kebijakan Implementasi perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kota Payakumbuh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter & Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data Primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *Purposif Sampling*. Analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Vasiliditas data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Fungsi Lem di Kota Payakumbuh masih banyak kekurangan secara sumber daya, baik dari sumber daya manusia, finansial dan saran prasarana di setiap implementator yang terlibat pada implementasi kebijakan tersebut. Sumber daya yang kurang dan belum memadai mempengaruhi pelaksanaan perda nomor 10 Tahun 2015 Tentang Larangan Penyalahgunaan Lem ini membuat menarik untuk di teliti.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, penyalahguna lem

Abstract

Robby Firly, 1210843021, implementation of Perda Number 10 year 2015 about prohibition of misuse of glue function in Kota Payakumbuh, Department of Public Adminitrasi Sciences, Faculty of Social Sciences of Political science, University of Andalas, Padang, 2019. Guided by: Rozidateno Princess Hanida, S. IP, M, PA and Roza Liesmana, S. IP, Msi. The thesis is composed of 154 pages with reference to 6 books of theory, 4 book methods, 3 thesis, 1 Regional organization, and 9 internet websites.

In order to save the young generation and maintain safety and comfort in the community, Pemko Payakumbuh issued Perda Number 10 year 2015 about prohibition abusers function of glue in the city of Payakumbuh. So many people are aware of the danger of misuse of this glue in humans or people. Satpol PP as Perda enforcement will certainly do actions that will enforce rules such as raids, then problems that exist in the community or victims of misuse of the glue function is reduced. Then the Social Department will undertake a rehabilitation process for the victims of glue function through rehabilitation agencies such as LSM GEMPA Payakumbuh. Moreover, the Health Department also conducts rehabilitation medically to the person/child glue that comes berkunjung for treatment or from the recommendation of Satpol PP or other agencies. The phenomenon of many there is this perda resulted in a change that the diminishing child of glue encountered by the implementation of the field, so that researchers are interested in reviewing the performance policy of implementation Perda No. 10 year 2015 about Prohibition of misuse of glue function in Payakumbuh city.

In this study, researchers used methods of qualitative descriptive research. The theory that researchers use is a theory of public policy implementation according to Van Metter & Van Horn. Data that researchers use is primary data and secondary data collected by interview methods, documentation and observation. The informant selection technique uses the Purposif Sampling technique. The data analysis used is data collection, data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. Vasilidity data using source triangulation.

The results showed that implementation of the implementation policy of Perda No. 10 year 2015 about prohibition of misuse of glue function in the city Payakumbuh still many resources shortage, both from human resources, financial and advice The infrastructure in each of the implementor involved in implementing the policy. Insufficient and insufficient resources affect the implementation of Perda Number 10 year 2015 about the prohibition of abuse this glue makes interesting to be thorough

Keywords: policy implementation, misuse of glue